

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penyusunan petunjuk teknis identifikasi arsip vital di Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mendukung implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 17 Tahun 2022 terkait Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah. Adanya petunjuk teknis ini diharapkan mampu memfasilitasi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dalam proses identifikasi arsip vital, tujuannya jelas untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan identifikasi yang ada pada dinas terkait dan memberikan alur identifikasi yang jelas, mulai dari proses analisis fungsi organisasi, penetapan jenis-jenis arsip vital, hingga pendistribusian daftar arsip vital oleh masing-masing bidang ke unit kearsipan. Berdasarkan kondisi hasil verifikasi dan uji coba yang telah dilaksanakan pada dinas terkait maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab identifikasi arsip vital belum sesuai Pergub Jateng No. 17 Tahun 2022 adalah karena tahapan identifikasi sebelumnya belum dilakukan melalui analisis fungsi organisasi, analisis hukum, dan analisis risiko sebagaimana yang dipersyaratkan dalam regulasi. Selain itu, banyaknya tuntutan tugas birokrasi yang harus ditangani staf juga membuat kegiatan identifikasi arsip vital belum menjadi prioritas utama. Akibatnya, jenis-jenis arsip vital pada masing-masing unit pengolah belum teridentifikasi secara pasti. Meskipun sudah terdapat daftar arsip vital di beberapa unit, pembaruan tidak dilakukan secara rutin dan distribusi daftar arsip vital ke unit kearsipan juga tidak berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi pada sulitnya temu kembali arsip vital ketika dibutuhkan.
2. Proses penyusunan Petunjuk Teknis identifikasi arsip vital di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Pada tahap pra-produksi, penyusunan diawali dengan studi pustaka, observasi lapangan, wawancara, serta analisis SWOT untuk memetakan kondisi

faktual dan kebutuhan instansi. Tahap produksi mencakup pembentukan tim penyusun, pembuatan draft, proses finalisasi, hingga uji coba terbatas pada bidang potensial. Tahap pasca-produksi diwujudkan melalui serah terima produk dan sosialisasi agar juknis dapat diterapkan secara efektif oleh unit pengolah dan unit kearsipan. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan juknis yang disusun berdasarkan kondisi nyata instansi namun tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.

3. Tidak ada kendala dalam penyusunan petunjuk teknis identifikasi arsip vital, namun dalam tahap implementasinya terdapat kendala dalam menentukan jenis-jenis arsip vital pada unit pengolah, hal ini didapatkan akibat tugas dan fungsi unit pengolah yang dinamis atau berubah-ubah setiap tahunnya. Selain itu staff unit pengolah juga belum sepenuhnya memahami mengenai kriteria dan karakteristik arsip vital. Kendala dapat diatasi dengan melakukan analisis organisasi, analisis hukum dan resiko secara mendalam dan disertai dengan memberikan pemahaman terhadap staff unit pengolah terkait kriteria dan karakteristik arsip vital.
4. Dampak adanya petunjuk teknis terhadap identifikasi arsip vital di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah terlihat dari tahapan pelaksanaannya yang menjadi lebih teratur, sistematis, dan sesuai dengan regulasi. Proses identifikasi kini diawali dengan penunjukan personel pada tiap unit pengolah, dilanjutkan dengan analisis fungsi organisasi oleh tim kerja, wawancara dengan kepala unit pengolah, serta pendataan melalui survei arsip vital. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui analisis hukum dan risiko untuk menetapkan jenis arsip vital, yang selanjutnya dituangkan dalam daftar arsip vital dan didistribusikan kepada unit kearsipan. Penerapan petunjuk teknis tersebut memberikan beberapa dampak positif, antara lain mengatasi permasalahan sulitnya temu kembali arsip vital ketika dibutuhkan, memastikan daftar arsip vital terdistribusi ke unit kearsipan, serta mencegah tidak teridentifikasinya arsip vital yang dapat menimbulkan kehilangan informasi akibat perlindungan fisik yang tidak optimal. Selain itu, proses identifikasi yang mengikuti petunjuk teknis

memungkinkan setiap unit pengolah mengetahui secara pasti jenis arsip vital yang mereka hasilkan. Penetapan arsip vital kini memiliki dasar hukum yang kuat karena seluruh langkah identifikasi berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 17 Tahun 2022.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pelaksanaan identifikasi arsip vital di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Saran-saran ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki praktik yang sudah berjalan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan penerapan petunjuk teknis secara konsisten di masa mendatang. Melalui keberlanjutan juknis, proses identifikasi arsip vital dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, efektif, dan efisien, sehingga mampu menjamin keamanan arsip, menjaga keberlangsungan informasi, serta mendukung optimalisasi kinerja organisasi secara berkesinambungan. Berikut merupakan saran yang ditujukan kepada dinas terkait.:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembekalan Secara Berkelanjutan
Agar petunjuk teknis tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan, diperlukan pelaksanaan sosialisasi dan pembekalan secara berkala kepada seluruh unit pengolah dan unit kearsipan. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa juknis dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh pegawai, termasuk ketika terjadi rotasi jabatan atau pergantian personel. Dengan demikian, kontinuitas penerapan juknis tetap terjaga dan tidak bergantung pada individu tertentu.
2. Keberlanjutan petunjuk teknis perlu didukung melalui evaluasi berkala untuk meninjau kesesuaian isi juknis dengan kondisi aktual instansi. Pemutakhiran perlu dilakukan apabila terdapat perubahan regulasi, restrukturisasi organisasi, penambahan unit kerja, atau munculnya jenis arsip baru. Langkah ini bertujuan agar juknis tetap relevan, aplikatif, dan menjadi acuan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.
3. Monitoring terhadap implementasi juknis perlu dilakukan oleh pimpinan unit kearsipan untuk memastikan bahwa proses identifikasi arsip vital

dilaksanakan sesuai prosedur. Selain itu, pembaruan daftar arsip vital secara periodik sangat diperlukan agar informasi yang tercantum tetap akurat, mutakhir, dan dapat digunakan pada saat diperlukan. Mekanisme pengawasan dan tindak lanjut ini menjadi kunci agar juknis tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan secara berkesinambungan.